

**Laporan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2025
Biro Pengendalian Kawasan Ekonomi Khusus**

A. Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2025

Hasil pengukuran kinerja Biro Pengendalian Kawasan Ekonomi Khusus, Sekretariat Jenderal Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 dapat ditampilkan pada Tabel 1, sebagai berikut:

**Tabel 1. Ringkasan Capaian Kinerja Biro Pengendalian Kawasan Ekonomi Khusus
Triwulan I Tahun 2025**

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Tahun 2025	Realisasi Triwulan I	Capaian (%)
I	Sasaran Program 1 : Terwujudnya dukungan Kawasan Ekonomi Khusus yang Berdaya Saing				
1.1	Indikator 1.1 Persentase Capaian Investasi KEK	persentase	90%	19,6%	21,7%
1.2	Persentase Pertumbuhan Tenaga Kerja dan Pelaku Usaha	persentase	>10%	7%	7%
II	Sasaran Program 2 : Terwujudnya Layanan Biro Pengendalian KEK yang Berkualitas				
2.1	Indikator 2.1 Indeks Kepuasan Layanan Biro Pengendalian	skala	3,1 (skala 4)	3,2	3,2
III	Sasaran Program 3 : Terlaksananya Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus yang Berkualitas				
3.1	Persentase Rekomendasi NSPK Pengendalian Pembangunan dan Pengelolaan KEK	persentase	90%	20%	22,2%
3.2	Persentase Fasilitasi Penyelesaian Pengendalian Pembangunan dan Pengelolaan KEK di Wilayah I	persentase	90%	70%	70%
3.3	Persentase Fasilitasi Penyelesaian Pengendalian Pembangunan dan Pengelolaan KEK di Wilayah II	persentase	90%	67%	67%
IV	Sasaran Program 4 : Terwujudnya Tata Kelola Biro Pengendalian KEK yang Baik				
4.1	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Biro Pengendalian KEK	persentase	90	120%	120%

Kinerja Biro Pengendalian Kawasan Ekonomi Khusus sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam ringkasan Tabel 1 dapat diuraikan sebagai berikut:

1

Sasaran Program : Terwujudnya dukungan Kawasan Ekonomi Khusus yang Berdaya Saing

Pencapaian Sasaran Program 1 : Terwujudnya Dukungan Kawasan Ekonomi Khusus yang Berdaya Saing ditunjukkan oleh indikator kinerja yaitu :

1. Persentase Capaian Investasi Kawasan Ekonomi Khusus
2. Persentase Pertumbuhan Tenaga Kerja dan Pelaku Usaha

Capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1.1. Persentase

Capaian Investasi Kawasan Ekonomi Khusus

Latar Belakang

Kawasan Ekonomi Khusus berfungsi sebagai sebuah kawasan dengan fasilitas dan kemudahan untuk meningkatkan laju investasi dan berkontribusi pada perekonomian di Indonesia. Maka dalam rangka mewujudkan pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus yang berdaya saing, KEK perlu dibentuk sesuai dengan potensi wilayah masing-masing serta kegiatan utama yang memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Selain pembentukan, pembangunan KEK juga perlu didukung dengan infrastruktur, baik di dalam maupun di luar kawasan, serta dilengkapi dengan pelayanan berstandar internasional dalam mendukung efektifitas dan efisiensi kegiatan KEK. Dalam rangka mendukung RPJMN 2025 – 2029, maka KEK dapat berkontribusi terhadap nilai investasi nasional. Nilai investasi di KEK berperan penting dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan daya saing kawasan tersebut di tingkat domestik maupun internasional.

Nilai investasi adalah nilai dari segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia. Nilai investasi KEK adalah jumlah total investasi yang masuk ke dalam kawasan tersebut, yang ditujukan untuk mendukung pengembangan kawasan, infrastruktur, dan kegiatan ekonomi lainnya dalam kawasan tersebut.

Hasil Pengukuran Kinerja

Target investasi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) pada Tahun 2025 ditetapkan sebesar Rp81,5 triliun, mencakup nilai penanaman modal yang dilakukan oleh Badan Usaha Pembangun dan Pengelola (BUPP) serta Pelaku Usaha (PU) di dalam kawasan. Perhitungan realisasi investasi dilakukan terhadap 24 KEK yang telah ditetapkan.

Pada Triwulan I Tahun 2025, realisasi investasi mencapai Rp15,9 Triliun atau setara dengan 19,6 % dari target tahunan. Angka ini mencerminkan progres awal yang positif terhadap pencapaian target investasi tahun berjalan. Ringkasan capaian kinerja investasi pada Triwulan I Tahun 2025 disajikan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
Persentase Capaian Investasi KEK	%	90%	19,6%	21,7%

Indikator ini digunakan untuk mengukur persentase realisasi investasi di seluruh Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) terhadap target tahunan yang telah ditetapkan

dalam Rapat Kerja Nasional Tahun 2024. Capaian indikator mencerminkan tingkat efektivitas fasilitasi, pengawasan, dan pengendalian yang dilakukan oleh Biro Pengendalian KEK dalam mendukung pelaksanaan investasi oleh Badan Usaha maupun Pelaku Usaha di dalam kawasan. Pengukuran dilakukan untuk menilai sejauh mana realisasi investasi mendekati target tahunan pada periode berjalan. Perhitungan capaian dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$\text{Persentase Capaian Investasi KEK} = \frac{\Sigma \text{Realisasi Investasi}}{\Sigma \text{Target Investasi}} \times 100\%$$

Pelaksanaan Rencana Aksi, Capaian Program dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pada saat laporan ini disusun, beberapa BUPP KEK belum menyampaikan data realisasi investasi secara lengkap. Angka yang tercantum bersifat sementara dan dapat diperbarui setelah seluruh laporan diterima dan diverifikasi. Capaian investasi masing-masing wilayah KEK dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

No	Kawasan Ekonomi Khusus	Target Investasi 2025 (Miliar Rupiah)	Realisasi Triwulan I 2025 (Miliar Rupiah)
1	KEK Tanjung Lesung	339,69	21,55
2	KEK Sei Mangkei	6.037,00	2.742,94
3	KEK Palu **	3.675,00	26,11
4	KEK Bitung **	880	999,95
5	KEK Morotai	127	0,5
6	KEK Mandalika	537,41	1,49
7	KEK MBTK **	78	0
8	KEK Tanjung Kelayang **	38,5	0
9	KEK Sorong**	25,7	0
10	KEK Arun Lhokseumawe	800,15	121,53
11	KEK Galang Batang	13.800,00	349,31
12	KEK Singhasari	500	146,25
13	KEK Likupang	158,73	2,2
14	KEK Kendal **	8.360,00	5.005,00
15	KEK Nongsa	2.835,00	1.385,82
16	KEK Lido	1.057,54	262,17
17	KEK Gresik	24.406,49	3.900,00
18	KEK BAT **	700	39
19	KEK Sanur	1.730,00	166,77
20	KEK KKB	1.796,18	110
21	KEK Tanjung Sauh	2.046,23	111,21

22	KEK Setangga	10.619,15	584,74
23	KEK Edukasi, Teknologi, dan Kesehatan Internasional Banten	142,15	10,22
24	KEK Pariwisata Kesehatan Internasional Batam**	817,00	0
TOTAL		81.506,92	15.986,76

** BUPP KEK belum menyampaikan data perkembangan KEK TW I Tahun 2025

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025, pelaksanaan rencana aksi Triwulan I Tahun 2025 sebagai berikut:

1.1 Persentase Capaian Investasi Kawasan Ekonomi Khusus			
No	Rencana Aksi TW I	Status	Keterangan
1.	Koordinasi dengan BUPP, Pelaku Usaha, dan Administrator	Terlaksana	<p>Sejumlah kegiatan telah dilakukan untuk mendukung peningkatan kinerja investasi dan penyerapan tenaga kerja di KEK, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> Pada 20 Januari 2025, telah diselenggarakan Rapat Kerja Nasional sebagai forum evaluasi terhadap kinerja dan realisasi investasi di Kawasan Ekonomi Khusus. Pertemuan koordinatif dengan BUPP, Pelaku Usaha, dan Administrator KEK telah dilaksanakan guna membahas kinerja pencapaian investasi serta memperkuat sinergi antar stakeholder. Pada Triwulan I 2025 telah terlaksana beberapa kali rapat koordinasi, berikut: <ul style="list-style-type: none"> 17 Maret 2025, Koordinasi Perkembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Bitung 24 Maret 2025, Rapat Koordinasi Perkembangan KEK Palu 25 Maret 2025, Audiensi dengan KEK Setangga 26 Maret 2025, Rapat Koordinasi Perkembangan KEK Sorong 27 Maret 2025, Rapat Koordinasi Perkembangan KEK Morotai 27 Maret 2025, Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Perkembangan KEK Bitung 27 Maret 2025, Rapat Koordinasi Perkembangan KEK MBTK
2	Pengumpulan dan Analisis Data Investasi	Terlaksana	Berdasarkan Nota Dinas Nomor PR.00/43/SJ.DNKEK.1/05/2025 terkait hal Penyampaian Laporan Narasi Kinerja Triwulan I T.A. 2025, telah diperoleh dan dimanfaatkan data laporan BUPP untuk

			memantau progres investasi masing-masing wilayah KEK pada Triwulan I 2025.
--	--	--	--

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan, telah dilaksanakan Rapat Kerja Nasional dan rapat dengan Administrator KEK pada tanggal 20-21 Januari 2025, yang membahas evaluasi kinerja serta pengendalian pembangunan dan pengelolaan KEK. Selain itu, laporan kinerja dari BUPP telah diterima dan dianalisis untuk mendukung pemantauan investasi secara lebih akurat. Pelaksanaan ini mencerminkan komitmen terhadap pencapaian target kinerja dan penguatan tata kelola KEK.

Hal tersebut tercermin dari realisasi investasi pada Triwulan I Tahun 2025 di beberapa KEK yang menunjukkan performa positif, antara lain KEK Kendal sebesar Rp5 triliun (59,8% dari target); KEK Gresik sebesar Rp3,9 triliun (15,9%); KEK Sei Mangkei sebesar Rp2,7 triliun (45,4%) dan KEK Nongsa sebesar Rp1,3 triliun (48,8%). Capaian ini menunjukkan efektivitas pemantauan serta sinergi antar pihak dalam mendorong percepatan investasi di kawasan.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Pada Triwulan I Tahun 2025, dari total 24 KEK, baru 17 BUPP yang menyampaikan laporan perkembangan secara lengkap. Kondisi ini menghambat proses evaluasi dan pencatatan capaian kinerja secara menyeluruh. Sebagai tindak lanjut, akan dilaksanakan Rapat Kerja Nasional pada Semester I Tahun 2025 sebagai forum untuk monitoring dan evaluasi pelaksanaan program, serta penguatan koordinasi dan pelaporan dari seluruh KEK. Diharapkan melalui Rapat Kerja Nasional ini, sinergi antar *stakeholder* dapat ditingkatkan guna mendukung pencapaian target kinerja secara lebih optimal pada periode berikutnya.

1.2. Persentase Pertumbuhan Tenaga Kerja dan Pelaku Usaha

Latar Belakang

Dalam upaya mendorong daya saing dan pertumbuhan ekonomi nasional, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) tidak hanya ditujukan sebagai pusat investasi, tetapi juga sebagai motor penciptaan lapangan kerja dan pemberdayaan pelaku usaha. Pertumbuhan jumlah tenaga kerja dan pelaku usaha merupakan indikator penting yang mencerminkan efektivitas pengelolaan KEK serta kontribusinya terhadap agenda pembangunan nasional, khususnya dalam mendukung visi Indonesia Emas 2045 dan RPJMN 2025–2029.

Biro Pengendalian KEK memiliki tugas dan fungsi untuk menyelenggarakan monitoring dan evaluasi, serta pengawasan dan pengendalian terhadap perkembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), termasuk dalam hal penyerapan tenaga kerja dan pertumbuhan jumlah pelaku usaha. Indikator ini mengukur pertumbuhan tenaga kerja dan pelaku usaha secara kumulatif di seluruh KEK, baik dari sektor industri, pariwisata, jasa, maupun sektor strategis lainnya. Data dihimpun dari laporan Triwulanan Badan Usaha Pengelola (BUPP), yang dikonsolidasikan oleh Biro Pengendalian KEK.

Hasil Pengukuran Kinerja

Pada Triwulan I Tahun 2025, telah terjadi penambahan tenaga kerja sebesar 15.778 orang dan peningkatan jumlah pelaku usaha sebanyak 22 pelaku usaha yang tersebar di beberapa KEK, terutama di sektor hilirisasi industri, pariwisata, dan jasa kesehatan. Berdasarkan data 2025 persentase pertumbuhan kumulatif pada Triwulan I adalah sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
Persentase Pertumbuhan Tenaga Kerja dan Pelaku Usaha KEK	%	>10%	7%	7%

Pemantauan atas indikator ini penting untuk menilai sejauh mana aktivitas ekonomi di dalam kawasan mampu menciptakan lapangan kerja dan menarik partisipasi dunia usaha. Evaluasi dilakukan secara berkala untuk memastikan bahwa pertumbuhan tersebut sejalan dengan target pembangunan KEK yang berkelanjutan dan inklusif. Capaian ini dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\begin{aligned} & \text{Pertumbuhan Tenaga Kerja dan Pelaku Usaha KEK} \\ &= \frac{(\Sigma \text{Kumulatif Tenaga Kerja } t1 - \Sigma \text{Kumulatif Tenaga Kerja } t0)}{\Sigma \text{Kumulatif Tenaga Kerja } t0} \times 50\% \\ &+ \frac{(\Sigma \text{Kumulatif Pelaku Usaha } t1 - \Sigma \text{Kumulatif Pelaku Usaha } t0)}{\Sigma \text{Kumulatif Pelaku Usaha } t0} \times 50\% \end{aligned}$$

Pelaksanaan Rencana Aksi, Capaian Program dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Perhitungan pertumbuhan tenaga kerja dan pelaku usaha di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) pada Triwulan I Tahun 2025 dilakukan dengan menggunakan formula gabungan yang mempertimbangkan dua komponen utama, yaitu pertumbuhan serapan tenaga kerja dan pertumbuhan pelaku usaha. Masing-masing komponen diberi bobot sebesar 50%, sehingga menghasilkan nilai pertumbuhan yang seimbang antara aspek ketenagakerjaan dan dinamika usaha di kawasan.

Berdasarkan data yang terkonsolidasi dari laporan BUPP, hasil perhitungan kumulatif hingga Triwulan I Tahun 2025, menunjukkan bahwa jumlah tenaga kerja kumulatif meningkat dari 160.989 orang (s.d. 2024) menjadi 173.532 orang (s.d. Triwulan I 2025), atau tumbuh sebesar 3,8% dengan skema pembobotan sesuai pada formula. Sementara itu, jumlah pelaku usaha naik dari 403 entitas menjadi 422 entitas, mencerminkan pertumbuhan sebesar 2,9% berdasarkan hasil perhitungan pembobotan.

Dengan demikian, total pertumbuhan kumulatif tenaga kerja dan pelaku usaha KEK Triwulan I Tahun 2025 mencapai 7%. Capaian ini mencerminkan peningkatan aktivitas ekonomi, terutama pada kawasan-kawasan yang telah aktif beroperasi dan melaporkan perkembangan secara lengkap. Meski menunjukkan tren positif, percepatan pada triwulan berikutnya tetap diperlukan agar target tahunan dapat tercapai secara optimal.

Pertumbuhan ini memperlihatkan bahwa kegiatan pengendalian dan fasilitasi yang dilakukan Biro Pengendalian KEK bersama Administrator KEK telah memberikan dampak positif terhadap perluasan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja di KEK. Upaya tersebut diharapkan terus ditingkatkan untuk menjaga momentum pertumbuhan sepanjang tahun.

Pada saat laporan ini disusun, beberapa BUPP KEK belum menyampaikan data penyerapan tenaga kerja dan pelaku usaha secara lengkap. Angka yang tercantum bersifat sementara dan dapat diperbarui setelah seluruh laporan diterima dan diverifikasi. Capaian perhitungan kumulatif hingga Triwulan I Tahun 2025 untuk serapan tenaga kerja dan pelaku usaha di KEK dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

No	Kawasan Ekonomi Khusus	Tenaga Kerja		Pelaku Usaha	
		Penyerapan TK Akumulatif S.D 2024	Penyerapan TK Akumulatif S.D 2025	Jumlah PU Akumulatif S.D 2024	Jumlah PU Akumulatif S.D 2025
1	KEK Tanjung Lesung	5.961	8.998	27	27
2	KEK Sei Mangkei	5.612	6.166	25	25
3	KEK Palu **	643	643	45	46
4	KEK Bitung **	988	1.158	14	14
5	KEK Morotai	384	402	7	7
6	KEK Mandalika	17.455	17.522	14	14
7	KEK MBTK **	226	276	1	1
8	KEK Tanjung Kelayang **	719	719	8	8
9	KEK Sorong**	124	124	10	10
10	KEK Arun Lhokseumawe	1.806	1.831	6	6
11	KEK Galang Batang	5.185	5.519	22	22
12	KEK Singhasari	856	871	23	23
13	KEK Likupang	1.010	1.045	8	8
14	KEK Kendal	61.984	64.704	112	124
15	KEK Nongsa	4.982	6.925	18	18
16	KEK Lido	4.879	5.008	9	9
17	KEK Gresik	39.656	40.500	30	32
18	KEK BAT **	2.269	2.358	1	1
19	KEK Sanur	3.826	4.199	11	13
20	KEK KKB	1.383	2.048	2	2
21	KEK Tanjung Sauh	240	283	1	5
22	KEK Setangga	796	2.228	9	9
23	KEK Edukasi, Teknologi, dan Kesehatan Internasional Banten	-	0	-	1
24	KEK Pariwisata Kesehatan Internasional Batam**	5	5	-	-
	TOTAL	160.989	173.532	403	425

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025, pelaksanaan rencana aksi Triwulan I Tahun 2025 sebagai berikut:

1.2 Persentase Pertumbuhan Tenaga Kerja dan Pelaku Usaha			
No	Rencana Aksi TW I	Status	Keterangan
1	Koordinasi dengan BUPP, Pelaku Usaha, dan Administrator	Terlaksana	<p>Sejumlah kegiatan telah dilakukan untuk mendukung peningkatan kinerja investasi dan penyerapan tenaga kerja di KEK, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> Pada 20 Januari 2025, telah diselenggarakan Rapat Kerja Nasional sebagai forum evaluasi terhadap kinerja dan realisasi investasi di Kawasan Ekonomi Khusus Pertemuan koordinatif dengan BUPP, Pelaku Usaha, dan Administrator KEK telah digelar guna membahas perkembangan investasi serta memperkuat sinergi antar pihak terkait. Pada Triwulan I 2025 telah terlaksana beberapa kali rapat koordinasi, berikut: <ul style="list-style-type: none"> 17 Maret 2025, Koordinasi Perkembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Bitung 24 Maret 2025, Rapat Koordinasi Perkembangan KEK Palu 25 Maret 2025, Audiensi dengan KEK Setangga 26 Maret 2025, Rapat Koordinasi Perkembangan KEK Sorong 27 Maret 2025, Rapat Koordinasi Perkembangan KEK Morotai 27 Maret 2025, Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Perkembangan KEK Bitung 27 Maret 2025, Rapat Koordinasi Perkembangan KEK MBTK
2	Pengumpulan dan Analisis Data Pelaku Usaha	Terlaksana	Berdasarkan Nota Dinas Nomor PR.00/43/SJ.DNKEK.1/05/2025 terkait hal Penyampaian Laporan Narasi Kinerja Triwulan I T.A. 2025, telah diperoleh dan dimanfaatkan data laporan BUPP untuk memantau progres serapan tenaga kerja dan pelaku usaha di berbagai KEK pada Trwiulan I 2025.

Capaian ini tidak terlepas dari pelaksanaan rencana aksi yang telah dijalankan, seperti penyelenggaraan Rapat Kerja Nasional dan rapat koordinatif antara BUPP, pelaku usaha, dan Administrator KEK sebagai forum evaluasi dan sinergi kebijakan. Selain itu, pengumpulan dan analisis data dari laporan BUPP turut mendukung pemantauan terhadap pertumbuhan serapan tenaga kerja dan pelaku usaha di setiap kawasan KEK secara lebih akurat. Pelaksanaan ini mencerminkan komitmen terhadap penguatan tata kelola serta pencapaian target pembangunan kawasan sepanjang tahun 2025.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Pada Triwulan I Tahun 2025, dari total 24 KEK, baru 17 BUPP yang menyampaikan laporan perkembangan secara lengkap. Kondisi ini menghambat proses evaluasi dan pencatatan capaian kinerja secara menyeluruh. Sebagai tindak lanjut, akan dilaksanakan Rapat Kerja Nasional pada Semester I Tahun 2025 sebagai forum untuk monitoring dan evaluasi pelaksanaan program, serta penguatan koordinasi dan pelaporan dari seluruh KEK. Diharapkan melalui Rakernas, sinergi antar *stakeholder* dapat ditingkatkan guna mendukung pencapaian target kinerja secara lebih optimal pada periode berikutnya.

2

Sasaran Program : Terwujudnya Layanan Biro Pengendalian Kawasan Ekonomi Khusus yang Berkualitas

Pencapaian Sasaran Program 2 : Terwujudnya Layanan Biro Pengendalian Kawasan Ekonomi Khusus yang Berkualitas ditunjukkan oleh indikator kinerja yaitu Indeks Kepuasan Layanan Biro Pengendalian. Capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1.1 Indeks Kepuasan Layanan Biro Pengendalian

Latar Belakang

Sebagai unit pelayanan publik yang menangani pengendalian dan fasilitasi penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus, Biro Pengendalian dituntut untuk memberikan layanan yang responsif, berkualitas, dan berorientasi pada kepuasan pemangku kepentingan. Kepuasan terhadap layanan yang diberikan menjadi ukuran utama dalam menilai efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi biro dari perspektif pengguna layanan (*customer*).

Biro Pengendalian Kawasan Ekonomi Khusus memiliki peran strategis dalam memastikan keberlangsungan dan efektivitas pengelolaan KEK secara nasional. Dalam menjalankan fungsi tersebut, Biro Pengendalian KEK tidak hanya berperan sebagai entitas regulator dan evaluator internal, tetapi juga sebagai penyedia layanan publik yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk Badan Usaha Pengelola (BUPP), Administrator KEK, Dewan Kawasan, serta kementerian/lembaga dan pemerintah daerah terkait.

Oleh karena itu, tingkat kepuasan para pengguna layanan terhadap kinerja Biro menjadi bagian integral dalam pengukuran keberhasilan institusi dari perspektif customer. Layanan yang dimaksud mencakup fasilitasi koordinasi kebijakan, konsultasi teknis, penanganan masalah, pemberian rekomendasi, hingga pelayanan informasi dan asistensi administratif lainnya. Indeks Kepuasan Layanan digunakan sebagai alat evaluasi untuk mengukur kualitas layanan publik yang diberikan, berdasarkan persepsi dan pengalaman pengguna terhadap berbagai aspek pelayanan seperti kejelasan prosedur, kecepatan pelayanan, kompetensi pelaksana, serta kemudahan akses informasi. Pada Triwulan I Tahun 2025, Indeks Kepuasan Layanan Fasilitas dan Kemudahan KEK telah terealisasi dengan ringkasan sebagai berikut:

Hasil Pengukuran Kinerja

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Tahun 2025	Realisasi s.d Triwulan I	Capaian Kinerja Triwulan I
Indeks Kepuasan Layanan Biro Pengendalian	indeks	3.1 (skala 4)	3.2	3.2

Penilaian ini menjadi dasar penting dalam perbaikan berkelanjutan sistem layanan publik Biro Pengendalian KEK agar lebih responsif, profesional, dan adaptif terhadap kebutuhan stakeholders di lingkungan KEK. Indeks Kepuasan Layanan dihitung berdasarkan hasil survei yang diberikan kepada BUPP dan/atau Pelaku Usaha, dengan mempertimbangkan beberapa aspek layanan utama. Nilai akhir diperoleh melalui rumus berikut:

$$\text{Indeks kepuasan} = \text{Nilai Unsur Survei Kepuasan Masyarakat} \times \text{Bobot}$$

Pelaksanaan Rencana Aksi, Capaian Program dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi diarahkan pada pelaksanaan survei dan evaluasi terhadap kualitas layanan biro, termasuk aspek koordinasi dan fasilitasi kebijakan. Pelaksanaan survei dan analisis awal telah memberikan gambaran kebutuhan perbaikan layanan.

No	Rencana Aksi TW I	Status	Keterangan
1	Survei pelayanan pengendalian pembangunan dan pengelolaan KEK	Terlaksana	Pada periode Triwulan I 2025, telah dibagikan survei kepuasan layanan yang ditujukan kepada Badan Usaha Pengelola (BUPP) dan Pelaku Usaha (PU). Dari total 63 responden, hasil survei menunjukkan bahwa secara umum layanan yang diberikan dinilai baik, dengan nilai indeks kepuasan sebesar 3.2.
2	Survei pelaksanaan koordinasi antar K/L	Terlaksana	Selama periode ini dilakukan pembahasan internal terkait koordinasi layanan Biro Pengendalian dengan K/L terkait.

Pada Triwulan I Tahun 2025, Biro Pengendalian KEK telah melaksanakan survei kepuasan layanan yang ditujukan kepada Badan Usaha Pengelola (BUPP) dan Pelaku Usaha (PU). Survei ini merupakan bagian dari pengembangan Indeks Kepuasan Layanan, yang bertujuan untuk mengevaluasi kualitas layanan biro sekaligus menjadi dasar perbaikan berkelanjutan.

Instrumen survei mencakup penilaian terhadap layanan fasilitasi debottlenecking atas isu yang dihadapi oleh BUPP atau pelaku usaha, serta pelayanan dalam penyusunan pedoman pembangunan dan pengelolaan KEK. Dari total 63 responden, hasil survei menunjukkan bahwa secara umum layanan yang diberikan dinilai baik, dengan nilai

indeks kepuasan sebesar 3,2. Sebagian besar responden menilai bahwa petugas biro memberikan layanan secara ramah, sopan, dan kompeten, serta mampu menjelaskan prosedur dengan jelas. Akses informasi terkait jenis layanan, persyaratan, dan mekanisme pengaduan juga dinilai mudah diakses dan tepat waktu.

Meskipun secara umum memuaskan, terdapat beberapa masukan terkait aspek teknis, khususnya pada kecepatan penanganan administratif dan kejelasan jadwal tindak lanjut. Pengguna berharap adanya perbaikan pada aspek keandalan pengiriman dokumen elektronik serta penguatan sarana pendukung lainnya, agar konsistensi dan kualitas layanan tetap terjaga. Sebagai tindak lanjut, Biro juga telah melakukan diskusi internal terkait rencana pengembangan survei lanjutan yang akan ditujukan kepada Kementerian/Lembaga terkait. Survei ini dirancang untuk mengukur efektivitas koordinasi lintas sektor dalam mendukung pengelolaan KEK, dan akan menjadi dasar penyusunan indikator serta pelaksanaan survei yang lebih menyeluruh pada periode selanjutnya.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Beberapa masukan muncul terkait kecepatan penanganan proses administratif dan koordinasi internal, meski umumnya memuaskan, ada keinginan agar penjadwalan dan tindak lanjut permohonan semakin diperjelas sehingga pengguna dapat merencanakan waktu mereka dengan lebih cermat. Untuk mempertahankan kekuatan pada aspek keramahan, kejelasan informasi, dan kompetensi petugas, serta memperbaiki area yang masih perlu ditingkatkan, Biro Pengendalian KEK perlu untuk terus melakukan penyempurnaan sebagai bagian dari upaya mewujudkan pelayanan publik yang prima.

3

Sasaran Program : Terlaksananya Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus yang Berkualitas

Pencapaian Sasaran Program 3 : Terwujudnya Layanan Biro Pengendalian Kawasan Ekonomi Khusus yang Berkualitas ditunjukkan oleh indikator kinerja yaitu :

1. Persentase Rekomendasi NSPK Pengendalian Pembangunan dan Pengelolaan KEK
2. Persentase Fasilitasi Penyelesaian Pengendalian Pembangunan dan Pengelolaan KEK di Wilayah I
3. Persentase Fasilitasi Penyelesaian Pengendalian Pembangunan dan Pengelolaan KEK di Wilayah II

Capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1.1. *Persentase Rekomendasi NSPK Pengendalian Pembangunan dan Pengelolaan KEK*

Latar Belakang

Pengelolaan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) membutuhkan keseragaman standar dan acuan normatif agar implementasinya berjalan efektif, akuntabel, dan berkelanjutan. Berdasarkan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus, diperlukan penerapan standar pengelolaan dan pengendalian yang sistematis dan menyeluruh di setiap tahapan siklus KEK, mulai dari pembangunan, pengoperasian, hingga pelaporan dan evaluasi.

Dalam konteks tersebut, penyusunan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Pengendalian Pembangunan dan Pengelolaan KEK menjadi instrumen utama yang memberikan panduan teknis dan administratif kepada para pemangku kepentingan, termasuk Badan Usaha Pengelola (BUPP), Pelaku Usaha (PU), Administrator KEK, Dewan Kawasan, dan Dewan Nasional KEK. NSPK ini menjadi kerangka acuan nasional untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan dalam KEK berjalan sesuai dengan rencana pembangunan, memperkuat efektivitas kelembagaan, serta memitigasi potensi dampak negatif dari kegiatan ekonomi di dalam kawasan

Melalui penyusunan dan pemberian rekomendasi terhadap NSPK, Biro Pengendalian KEK menjalankan peran strategisnya sebagai penjaga mutu dan pengarah teknis dalam sistem penyelenggaraan KEK. Adapun target kinerja pada tahun 2025 Triwulan I adalah sebesar 20%, dengan hasil pengukuran kinerja sebagai berikut:

Hasil Pengukuran Kinerja

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
Persentase Rekomendasi NSPK Pengendalian Pembangunan dan Pengelolaan KEK	%	90%	20%	22,2%

Biro Pengendalian Kawasan Ekonomi Khusus berperan dalam mendukung penyusunan dan pemantauan standar pembangunan serta pengelolaan KEK, termasuk memfasilitasi penyelesaian isu-isu strategis yang muncul selama proses pembangunan dan evaluasi kawasan. Untuk mendorong terciptanya KEK yang berkualitas dan memenuhi standar internasional, diperlukan pengembangan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) terkait infrastruktur dan wilayah sebagai pedoman pembangunan. Proses penyempurnaan NSPK ini bertujuan untuk menelaah standar yang telah ada serta menggali peluang pengembangan standar baru yang relevan dengan kebutuhan pengelolaan KEK ke depan.

Pada Triwulan I Tahun 2025, capaian kinerja telah mencapai 20% dari target tahunan yang menunjukkan progres dalam pelaksanaan kegiatan terkait pengembangan NSPK. Nilai persentase ini diperoleh melalui perhitungan menggunakan formula sebagai berikut:

$$\% \text{ rekomendasi NSPK} = \frac{\sum \text{NSPK yang ditindaklanjuti}}{\sum \text{NSPK yang direncanakan}} \times 100\%$$

Pelaksanaan Rencana Aksi, Capaian Program dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan serangkaian langkah atau kegiatan yang dirancang untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan. Indikator kinerja ini secara khusus diarahkan untuk mendukung perbaikan prosedur monitoring dan evaluasi Kawasan Ekonomi Khusus, serta menangani isu-isu strategis dan hambatan yang menjadi kendala (*debottlenecking*) dalam pelaksanaannya.

Berdasarkan rencana aksi yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025, pelaksanaan rencana aksi pada Triwulan I Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

No	Rencana Aksi TW I	Status	Keterangan
1	Implementasi konsep tata kelola terkait pembangunan dan kesiapan beroperasi KEK	Terlaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Telah diterbitkan Pedoman Pembangunan dan Evaluasi Kesiapan Beroperasi KEK serta Pedoman Penerbitan, Perubahan, dan Pencabutan Tanda Pengenal Khusus Badan Usaha dan/atau Pelaku di KEK yang termuat pada Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Nasional KEK No. 4 Tahun 2025. 2. Koordinasi terkait Pembahasan Lanjutan Pedoman telah difasilitasi melalui rapat bersama Direktorat Fasilitas dan Kepabeanan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan, LNSW, serta Administrator KEK. 3. Rapat Pembahasan Penyesuaian Pedoman <i>Estate Regulation</i> telah diselenggarakan oleh Biro Pengendalian bersama dengan BUPP pada beberapa KEK diantaranya: <ul style="list-style-type: none"> • 10 Januari 2025, Pembahasan Pedoman Estate Regulation Kawasan Ekonomi Khusus Sanur dan Kawasan Ekonomi Khusus Kura Kura Bali • 13 Januari 2025, Pembahasan Hasil Penyesuaian Pedoman Estate Regulation KEK Gresik • 14 Januari 2025, Pembahasan Pedoman Tanda Pengenal Khusus dan Perizinan Berusaha di Bidang Ekspor • 7 Februari 2025, Pembahasan Estate Regulation KEK Galang Batang • 7 Maret 2025, Pembahasan Tanda Pengenal Khusus • Telah dilakukan simulasi verifikasi RKL-RPL rinci KEK melalui sistem OSS sebagai bagian dari penerapan dokumen lingkungan dalam proses perizinan berusaha.
2	Implementasi konsep tata kelola terkait pengelolaan KEK	Terlaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Telah disusun lembar kerja Petunjuk Teknis Pengawasan Administrator KEK melalui Rapat Pembahasan yang dilakukan oleh Biro Pengendalian bersama dengan Administrator KEK 2. Telah terlaksana Rapat Pembahasan Pedoman Tanda Pengenal Khusus dan Perizinan Berusaha di Bidang Ekspor

Penerapan prinsip tata kelola dalam aspek pembangunan dan kesiapan operasional Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) menunjukkan progres yang positif. Pada Triwulan I

Tahun 2025, capaian kinerja indikator penyusunan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) telah mencapai 20%, ditandai dengan diterbitkannya satu NSPK sebagai bagian dari rencana tahunan.

NSPK yang dimaksud adalah Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Nasional KEK Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pedoman Pembangunan dan Evaluasi Kesiapan Beroperasi KEK serta Pedoman Penerbitan, Perubahan, dan Pencabutan Tanda Pengenal Khusus bagi Badan Usaha dan/atau Pelaku Usaha di KEK. Pedoman ini menjadi acuan bagi Administrator, Badan Usaha, dan Pelaku Usaha dalam proses penerbitan dan pengelolaan Tanda Pengenal Khusus, sekaligus memperkuat standar operasional pengelolaan kawasan.

Capaian ini mencerminkan komitmen Biro Pengendalian KEK dalam memperkuat regulasi teknis yang mendukung konsistensi pengendalian dan pengawasan KEK di seluruh Indonesia. Sejumlah kegiatan koordinasi telah dilaksanakan dalam rangka penyusunan laporan pengembangan standar pembangunan dan pengelolaan KEK. Proses penerapan konsep tata kelola juga dilakukan melalui kolaborasi antara Biro Pengendalian KEK dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Lembaga National Single Window (LNSW), Administrator KEK, serta instansi terkait lainnya. Inisiatif ini ditujukan untuk memperkuat sistem manajemen dan meningkatkan kesiapan operasional kawasan dalam mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi di KEK.

Sebagai bagian dari rencana aksi, telah dilaksanakan rapat pembahasan pedoman Tanda Pengenal Khusus (TPK) dan perizinan berusaha di bidang ekspor. Pembahasan ini bertujuan menyusun pedoman teknis yang dapat mempermudah akses pelaku usaha terhadap fasilitas ekspor. Selain itu, dilakukan pula simulasi verifikasi dokumen RKL-RPL rinci KEK melalui sistem OSS, sebagai bagian dari penerapan dokumen lingkungan dalam proses perizinan berusaha.

Pada Triwulan I Tahun 2025, pelaksanaan rencana aksi telah mempertimbangkan prinsip efisiensi, khususnya dalam penggunaan sumber daya anggaran. Untuk kegiatan penyusunan Rekomendasi NSPK terkait Pembangunan dan Pengelolaan KEK, hingga akhir Triwulan I sudah terealisasi mencapai 6,91% dari total anggaran yang tersedia.

Pelaksanaan rencana aksi ini telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya mempertimbangkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025, dan peraturan terkait lainnya.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Hingga dengan akhir Triwulan I, belum ditemukan kendala atau hambatan signifikan dalam upaya pencapaian target yang telah ditetapkan. Hal ini tercermin dari kelancaran pelaksanaan kegiatan penyelesaian pengendalian serta proses penyempurnaan

NSPK pembangunan dan pengelolaan yang dilaksanakan oleh Biro Pengendalian Kawasan Ekonomi Khusus.

**1.2. Persentase
Fasilitasi
Penyelesaian
Pengendalian
Pembangunan dan
Pengelolaan KEK
di Wilayah I**

Latar Belakang

Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) merupakan inisiatif strategis nasional yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan lintas sektor dan lintas wilayah. Agar tujuan KEK dapat tercapai secara optimal dan berkelanjutan, dibutuhkan pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan secara menyeluruh dalam setiap tahap pembangunan dan pengelolaan kawasan. Dalam hal ini, fasilitasi penyelesaian permasalahan strategis di wilayah KEK menjadi fungsi krusial dari Biro Pengendalian KEK sebagai perpanjangan tangan dari Dewan Nasional KEK.

Wilayah I yang terdiri dari sejumlah KEK di pulau Sumatera & Kalimantan dengan karakteristik dan tantangan masing-masing, seringkali menghadapi hambatan implementatif baik di level teknis maupun kebijakan. Permasalahan yang timbul bisa berupa keterlambatan pembangunan infrastruktur, tumpang tindih kewenangan antar lembaga, belum optimalnya insentif fiskal, hingga persoalan administratif seperti perizinan dan pelaporan. Dalam kondisi ini, diperlukan peran aktif dan responsif dari Biro Pengendalian KEK untuk mengoordinasikan penyelesaian masalah secara lintas sektoral dan lintas pemerintahan.

Indikator ini mengukur sejauh mana Biro telah berhasil memfasilitasi penyelesaian permasalahan strategis di KEK Wilayah I dengan pendekatan yang mengedepankan koordinasi kebijakan, komunikasi antar institusi, dan penguatan mekanisme monitoring. Fasilitasi yang dimaksud tidak terbatas pada pengumpulan data atau pencatatan masalah, tetapi mencakup tindak lanjut aktif berupa penyusunan rekomendasi, pelibatan K/L dan pemda, serta dorongan konkret untuk penyelesaian teknis maupun regulatif.

Tingkat capaian indikator ini mencerminkan efektivitas fungsi pengendalian Biro dalam mendorong sinergi antar pihak yang terlibat dalam pengelolaan KEK. Semakin tinggi tingkat fasilitasi yang berhasil diselesaikan, semakin menunjukkan bahwa KEK dikelola dengan dukungan kebijakan yang solid, sinkron, dan bebas dari hambatan sistemik yang dapat mengganggu keberlanjutan pengembangannya. Berikut hasil pengukuran kinerja pada Triwulan I tahun 2025:

Hasil Pengukuran Kinerja

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Tahun 2025	Realisasi s.d Triwulan I	Capaian Kinerja Triwulan I
Persentase Fasilitasi Penyelesaian Pengendalian Pembangunan dan Pengelolaan Kawasan Ekonomi Khusus di Wilayah I	%	90 %	70%	70%

Sebagai langkah awal pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), telah diselenggarakan rapat kerja bersama Dewan Kawasan, BUPP, dan Administrator KEK guna memperoleh gambaran menyeluruh mengenai rencana kerja tahunan, target kinerja, serta berbagai isu strategis di KEK Wilayah I. KEK Wilayah I yang menjadi fokus pengendalian mencakup KEK Arun Lhokseumawe, KEK Sei Mangkei, KEK Nongsa, KEK Batam Aero Technic, KEK Pariwisata Kesehatan Internasional Batam, KEK Tanjung Sauh, KEK Galang Batang, KEK Tanjung Kelayang, KEK Maloy Batuta Trans Kalimantan (MBTK) serta

KEK Setangga. Kegiatan monitoring dan evaluasi dilakukan melalui observasi langsung serta dokumentasi perkembangan dan pertumbuhan kawasan.

Dalam rangka meningkatkan kinerja pengelolaan kawasan, telah dilakukan identifikasi terhadap berbagai hambatan (*debottlenecking*), yang meliputi tantangan infrastruktur maupun kendala dalam pelaksanaan fasilitas dan kemudahan. Untuk itu, audiensi dengan BUPP, pelaku usaha, dan instansi pemerintah terkait dilaksanakan sebagai upaya merumuskan solusi secara terpadu. Persentase penyelesaian ini bertujuan untuk mengukur pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi pembangunan serta pengelolaan KEK, yang dihitung menggunakan formula sebagai berikut:

$$\% \text{ Fasilitasi Penyelesaian Pengendalian Pembangunan dan Pengelolaan KEK} = \frac{\left(\frac{\Sigma \text{Permasalahan KEK yang ditindaklanjuti}}{\Sigma \text{Permasalahan KEK yang masuk}} \times 70\% + \frac{\Sigma \text{Penyelesaian Permasalahan} \times \text{skor tahapan}}{\Sigma \text{Rekomendasi Permasalahan KEK untuk diselesaikan stakeholder KEK}} \times 30\% \right)}{100}$$

Pelaksanaan Rencana Aksi, Capaian Program dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Upaya fasilitasi di Wilayah II telah difokuskan pada perencanaan pembangunan, pengelolaan dan penyelesaian isu-isu strategis. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa sebagian besar isu yang ada telah ditindaklanjuti melalui koordinasi teknis. Berdasarkan hasil penghitungan indikator, tingkat capaian fasilitasi penyelesaian permasalahan strategis di KEK Wilayah I tercatat sebesar 67%.

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025, pelaksanaan rencana aksi Triwulan I Tahun 2025 sebagai berikut:

No	Rencana Aksi TW I	Status	Keterangan
1	Rapat Kerja Penyusunan Target Investasi dan Tenaga Kerja KEK	Terlaksana	Sejumlah kegiatan telah dilakukan untuk mendukung peningkatan kinerja investasi dan penyerapan tenaga kerja di KEK, meliputi: 1. Pada 8 Januari 2025, Rapat Pembahasan potensi penambahan target investasi KEK Tahun 2025 telah dilakukan sebagai tindak lanjut inisiasi penetapan target. 2. Pada 20 Januari 2025, telah dilaksanakan Rapat Kerja Nasional dan Evaluasi Kinerja KEK Tahun 2024 yang dihadiri oleh Dewan Kawasan, Administrator KEK, BUPP, dan LPEM UI.
2	Perencanaan pembangunan KEK Wilayah I	Terlaksana	Sebagai bagian dari perencanaan pembangunan KEK, kegiatan pada Wilayah I telah difokuskan pada aspek fasilitasi, pemantauan, dan pengendalian. Pada TW I telah terlaksana kegiatan meliputi: 1. Telah dilaksanakan Rapat Koordinasi dengan Administrator

			<p>KEK terkait Pengendalian Pembangunan dan Pengelolaan KEK, beberapa rapat yang terlaksana diantaranya:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 7 Februari 2025, Rapat Koordinasi Bersama Administrator KEK (RKL-RPL Rinci) • 12 Maret 2025, Koordinasi Administrator KEK terkait Pengendalian Pembangunan dan Pengelolaan KEK <p>2. Pada tanggal 7 Maret 2025, telah dilaksanakan Rapat Tindak Lanjut Pembentukan Kawasan Pabean di KEK Sei Mangkei yang melibatkan Administrator KEK Sei Mangkei, Direktur Fasilitas Kepabeanan, Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Kepala Kantor Wilayah Bea dan Cukai Provinsi Sumatera Utara, serta BUPP.</p>
3	Debottlenecking isu strategis KEK	Terlaksana	<p>Upaya <i>debottlenecking</i> isu strategis dilakukan untuk memastikan kelancaran pengelolaan dan operasional KEK. Pada Triwulan I, kegiatan yang telah dilaksanakan antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pada 8 Januari 2025, telah terlaksana Rapat Pembahasan Penanganan Permasalahan Sistem Aplikasi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang melibatkan Administrator KEK, Lembaga National Single Window (LNSW), Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), serta Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan. 2. Pada 25 Februari 2025, telah dilakukan Rapat Pembahasan dengan Perwakilan Kementerian Lingkungan Hidup sebagai upaya tindak lanjut penyelesaian isu lingkungan di Kawasan Ekonomi Khusus terkhususnya pada Wilayah 1 yaitu KEK Arun Lhokseumawe. 3. 27 Maret 2025, Rapat Koordinasi Perkembangan KEK MBTK 4. Telah terlaksana Rapat Pembahasan Persetujuan Impor untuk KEK Galang Batang guna mendukung kelancaran operasional kawasan 5. Pada 27 Maret 2025, telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Perkembangan KEK MBTK sebagai bagian dari pemantauan dan evaluasi progres pengembangan kawasan. 6. Pada 11 Maret 2025, telah terlaksana Rapat Peningkatan Konektivitas Penerbangan Morotai & Tanjung Kelayang yang melibatkan Kementerian Koordinator Bidang Perkonomian, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pariwisata, Kementerian BUMN, Dewan

			Kawasan, Maskapai, BUPP dan Prospera.
--	--	--	---------------------------------------

Berbagai kegiatan telah diselenggarakan guna mendukung proses penyusunan dan peningkatan kesiapan operasional serta pengelolaan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Wilayah I. Kegiatan tersebut mencakup rapat pembahasan potensi penambahan target investasi, koordinasi teknis mengenai pembentukan Kawasan Pabean di KEK Sei Mangkei, serta diskusi terkait pembebasan bea masuk suku cadang pesawat di KEK Batam Aero Technic.

Sebagai bagian dari upaya fasilitasi isu lingkungan, Biro Pengendalian KEK telah menyelenggarakan pertemuan dengan Kementerian Lingkungan Hidup untuk membahas isu lingkungan yang terjadi di beberapa KEK, salah satunya di KEK Arun Lhokseumawe. Kegiatan lainnya meliputi rapat koordinasi bersama Kementerian/Lembaga terkait sebagai dukungan terhadap penyelesaian isu-isu strategis dan percepatan operasional KEK. Langkah-langkah ini mendukung terciptanya pengelolaan KEK yang lebih siap secara operasional, sekaligus memperkuat daya tarik investasi dan kontribusi kawasan terhadap pertumbuhan ekonomi wilayah. Selain itu, telah dilaksanakan Rapat Pembahasan Persetujuan Impor KEK Galang Batang untuk mendukung kelancaran operasional kawasan, serta Rapat Koordinasi Perkembangan KEK MBTK dalam rangka memantau dan mengevaluasi progres pengembangan kawasan tersebut.

Pelaksanaan rencana aksi selama Triwulan I Tahun 2025 menunjukkan pemanfaatan anggaran yang cukup signifikan pada tahap awal pelaksanaan. Kegiatan rekomendasi pengendalian pembangunan KEK di Wilayah I, hingga akhir Triwulan I terealisasi sekitar 44,01% dari total anggaran kegiatan.

Pelaksanaan rencana aksi ini telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya mempertimbangkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025, dan peraturan terkait lainnya.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Hingga Triwulan I, belum terdapat kendala dan hambatan yang berarti yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Hal tersebut terlihat pada pelaksanaan kegiatan penyelesaian pengendalian pembangunan dan pengelolaan Kawasan Ekonomi Khusus Wilayah I pada Biro Pengendalian Kawasan Ekonomi Khusus berjalan dengan lancar.

1.3. Persentase Fasilitasi Penyelesaian Pengendalian Pembangunan dan

Latar Belakang

Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dirancang sebagai wilayah strategis yang dilengkapi dengan fasilitas dan kemudahan tertentu untuk meningkatkan investasi serta mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Agar KEK dapat berkembang secara optimal, diperlukan proses pengembangan yang terstruktur, mulai dari tahap

Pengelolaan KEK di Wilayah II

pengusulan, penetapan, pembangunan, hingga operasional. Pada tahap pembangunan dan pengelolaan, diperlukan ekosistem pendukung seperti infrastruktur kawasan, regulasi yang kondusif, pelayanan perizinan yang profesional, serta kapasitas kelembagaan yang andal.

Dalam konteks ini, Biro Pengendalian KEK Wilayah II berperan penting dalam memastikan bahwa proses pembangunan dan pengelolaan KEK di wilayah Jawa, Bali, Sulawesi, dan Papua berjalan sesuai arah kebijakan dan rencana strategis nasional. Fungsi pengendalian mencakup koordinasi lintas pemangku kepentingan, monitoring pelaksanaan kebijakan, fasilitasi penyelesaian isu, serta evaluasi capaian di lapangan. Pengendalian ini dilakukan secara berkelanjutan untuk mendorong keterpaduan kebijakan dan menekan potensi hambatan struktural yang dapat mengganggu kesiapan kawasan.

Sepanjang Triwulan I Tahun 2025, berbagai kegiatan fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi telah dilaksanakan sebagai bentuk pelaksanaan fungsi pengendalian. Pelaksanaan ini juga bertujuan untuk memperkuat konsistensi antara kebijakan pusat dan pelaksanaan teknis di daerah, serta mempercepat penanganan isu-isu yang berpotensi menghambat pengembangan kawasan. Tingkat capaian indikator ini mencerminkan efektivitas Biro dalam mengawal pembangunan KEK secara akuntabel, terarah, dan selaras dengan tujuan strategis nasional. Hasil pengukuran kinerja disajikan sebagai berikut:

Hasil Pengukuran Kinerja

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Tahun 2025	Realisasi s.d Triwulan I	Capaian Kinerja Triwulan I
Persentase Capaian Investasi KEK	%	90 %	67%	67%

Sebagai awal kegiatan pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), telah diselenggarakan rapat kerja bersama antara BUPP dan Administrator KEK guna memperoleh informasi komprehensif terkait rencana kerja tahunan, target kinerja, serta isu dan tantangan strategis di masing-masing KEK Wilayah II. Dalam rangka pelaksanaan monitoring dan evaluasi, dilakukan observasi langsung di lapangan serta pendokumentasian perkembangan kawasan berdasarkan indikator pertumbuhan dan kemajuan pengelolaan. KEK yang termasuk dalam cakupan pengendalian di Wilayah II antara lain KEK Tanjung Lesung, KEK Lido, KEK Kendal, KEK Gresik, KEK Singhasari, KEK Mandalika, KEK Palu, KEK Bitung, KEK Likupang, KEK Sanur, KEK Morotai, dan KEK Sorong.

Hasil pengukuran kinerja pada Triwulan I Tahun 2025 menunjukkan bahwa tingkat fasilitasi dan pengendalian terhadap isu-isu strategis di KEK Wilayah II mencapai 67%. Nilai ini mencerminkan adanya tindak lanjut terhadap sejumlah isu yang telah diidentifikasi dalam rapat kerja dan hasil observasi lapangan. KEK di Wilayah II umumnya berada pada tahapan pembangunan dan pengelolaan yang bervariasi, sehingga pengendalian tidak hanya difokuskan pada penyelesaian masalah teknis, tetapi juga pada dukungan kelembagaan dan sinkronisasi kebijakan antar-instansi. Nilai capaian diperoleh dari penghitungan kegiatan monitoring, evaluasi, dan fasilitasi yang telah dilaksanakan, dengan menggunakan formula berikut:

$$\begin{aligned}
 \% \text{ Fasilitasi Penyelesaian Pengendalian Pembangunan dan Pengelolaan KEK} = & \\
 & \frac{(\Sigma \text{Permasalahan KEK yang ditindaklanjuti})}{\Sigma \text{Permasalahan KEK yang masuk}} \times 70\% + \\
 & \frac{\Sigma \text{Penyelesaian Permasalahan} \times \text{skor tahapan}}{\Sigma \text{Rekomendasi Permasalahan KEK untuk diselesaikan stakeholder KEK}} \times 30\%
 \end{aligned}$$

Pelaksanaan Rencana Aksi, Capaian Program dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Upaya fasilitasi di Wilayah II telah difokuskan pada perencanaan pembangunan, pengelolaan dan penyelesaian isu-isu strategis. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa sebagian besar isu yang ada telah ditindaklanjuti melalui koordinasi teknis. Berdasarkan hasil penghitungan indikator, tingkat capaian fasilitasi penyelesaian permasalahan strategis di KEK Wilayah I tercatat sebesar 67%.

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025, pelaksanaan rencana aksi Triwulan I Tahun 2025 sebagai berikut:

No	Rencana Aksi TW I	Status	Keterangan
1	Rapat Kerja Penyusunan Target Investasi dan Tenaga Kerja KEK	Terlaksana	Sejumlah kegiatan telah dilakukan untuk mendukung peningkatan kinerja investasi dan penyerapan tenaga kerja di KEK, meliputi: <ol style="list-style-type: none"> 1. Rapat Pembahasan potensi penambahan target investasi KEK Tahun 2025 telah dilakukan pada 8 Januari 2025 sebagai tindak lanjut inisiasi penetapan target. 2. Telah dilaksanakan Rapat Kerja Nasional dan Evaluasi Kinerja KEK Tahun 2024 yang dihadiri oleh Dewan Kawasan, Administrator KEK, BUPP, dan LPEM UI.
2	Perencanaan pembangunan KEK Wilayah II	Terlaksana	Rangkaian kegiatan perencanaan dilakukan melalui rapat pengembangan KEK Singhasari bersama LPDP serta pembahasan rencana usulan perluasan kawasan di KEK Gresik sebagai bagian dari persiapan pengelolaan KEK Wilayah II.
3	<i>Debottlenecking</i> isu strategis KEK	Terlaksana	Sebagai bagian dari perencanaan pembangunan KEK, kegiatan pada Wilayah II telah difokuskan pada aspek fasilitasi, pemantauan, dan pengendalian. Pada TW I telah terlaksana kegiatan meliputi: <ol style="list-style-type: none"> 1. Telah dilakukan kegiatan untuk memperbaiki dan mempersiapkan operasional serta pengelolaan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Wilayah 2, meliputi audiensi dengan Kementerian Lingkungan Hidup sebagai upaya fasilitasi isu lingkungan hidup di KEK, terutama untuk KEK Kendal. 2. Telah dilakukan rapat koordinasi perkembangan KEK Palu, Sorong, dan Morotai sebagai bagian dari pemantauan dan evaluasi berkelanjutan terhadap progres kawasan. 3. Telah dilakukan rapat pembahasan dalam upaya penanganan isu Sistem Aplikasi di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) 4. Telah terlaksana rapat pembahasan sebagai Tindak Lanjut Penanganan Verifikasi Pengaduan PT MNC Land di KEK Lido

			<ol style="list-style-type: none"> 5. Telah dilakukan Rapat pembahasan pengembangan KEK Singhasari dengan dukungan LPDP 6. Rapat mengenai mekanisme perizinan alat kesehatan oleh pelaku usaha logistik di KEK, serta pengaturan perpajakan untuk Bentuk Usaha Tetap (BUT). 7. Telah terlaksana diskusi mengenai peningkatan konektivitas penerbangan di Morotai melibatkan Kementerian Koordinator Bidang Perkonomian, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pariwisata, Kementerian BUMN, Dewan Kawasan, Maskapai, BUPP dan Prospera. Maskapai, BUPP dan Prospera.
--	--	--	--

Berbagai kegiatan telah dilaksanakan dalam rangka mendukung penyempurnaan dan persiapan operasional pengelolaan KEK di Wilayah II. Kegiatan tersebut meliputi rapat pengembangan KEK Singhasari bersama LPDP untuk pembahasan pengembangan Zona Pendidikan di kawasan tersebut. Selain itu, telah dilaksanakan pembahasan mengenai rencana usulan perluasan kawasan di KEK Gresik sebagai bagian dari persiapan pengelolaan KEK Wilayah II. Dukungan teknis juga diberikan melalui rapat pembahasan dukungan Kementerian/Lembaga di KEK.

Rangkaian kegiatan lainnya termasuk pembahasan mekanisme perizinan alat kesehatan dan pembahasan fasilitas obat impor di KEK Sanur. Selain itu, dilaksanakan pembahasan untuk pengaturan perpajakan bentuk usaha tetap di KEK. Seluruh kegiatan ini merupakan bagian dari strategi pengendalian untuk memperkuat kesiapan dan tata kelola kawasan secara menyeluruh.

Pelaksanaan rencana aksi selama Triwulan I Tahun 2025 menunjukkan pemanfaatan anggaran yang cukup signifikan pada tahap awal pelaksanaan. Kegiatan rekomendasi pengendalian pembangunan KEK di Wilayah II, sudah terealisasi hingga akhir Triwulan I sekitar 60.28% dari total anggaran kegiatan.

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang Triwulan I tahun 2025 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya mempertimbangkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025, dan peraturan terkait lainnya.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Hingga Triwulan I, belum terdapat kendala dan hambatan yang berarti yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Hal tersebut terlihat pada pelaksanaan kegiatan penyelesaian pengendalian pembangunan dan pengelolaan Kawasan Ekonomi Khusus Wilayah II pada Biro Pengendalian Kawasan Ekonomi Khusus berjalan dengan lancar.

Pencapaian Sasaran Program 4 : Terwujudnya Tata Kelola Biro Pengendalian KEK yang baik ditunjukkan oleh indikator kinerja yaitu Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Biro Pengendalian KEK. Capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

**1.1 Persentase
Kualitas
Pelaksanaan
Anggaran Biro
Pengendalian
KEK**

Latar Belakang

Pelaksanaan anggaran yang baik mencerminkan tidak hanya kemampuan biro dalam menyerap anggaran secara optimal, tetapi juga menunjukkan efektivitas biro dalam memadukan antara perencanaan program, pelaksanaan kegiatan, serta pertanggungjawaban keuangan secara tepat waktu dan tepat sasaran. Dalam pelaksanaannya, tata kelola anggaran tidak terlepas dari sistem manajemen internal yang terpadu dan profesional. Hal ini mencakup perencanaan anggaran yang berbasis kinerja, mekanisme pelaporan dan evaluasi yang terintegrasi, serta pengawasan internal yang berjalan secara efektif. Selain itu, keberhasilan pengelolaan anggaran juga sangat dipengaruhi oleh tersedianya sumber daya manusia yang kompeten dan profesional, dukungan sarana dan prasarana kerja yang memadai, serta sistem administrasi dan prosedur kerja yang efisien dan selaras dengan kebijakan kelembagaan.

Kualitas pelaksanaan anggaran tidak hanya diukur dari tingkat penyerapan semata, melainkan juga dari kesesuaian antara alokasi dan output yang dihasilkan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta kemampuan biro dalam menyesuaikan pelaksanaan kegiatan dengan dinamika dan kebutuhan di lapangan. Oleh karena itu, penguatan kapasitas kelembagaan, peningkatan kualitas SDM, serta pemanfaatan teknologi informasi dan sistem digitalisasi anggaran menjadi faktor-faktor penting yang harus terus dikembangkan dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola biro secara menyeluruh.

Indikator ini juga berperan sebagai cerminan kinerja biro dalam mendukung tata kelola Sekretariat Jenderal Dewan Nasional KEK secara umum, khususnya dalam menciptakan ekosistem kerja yang produktif, transparan, dan akuntabel. Peningkatan kualitas pelaksanaan anggaran akan berdampak langsung pada kelancaran implementasi program-program strategis pengendalian KEK, sehingga mendukung tercapainya tujuan nasional dalam pengembangan kawasan ekonomi yang berdaya saing dan inklusif.

Indikator kualitas pelaksanaan anggaran difokuskan pada penyusunan dan pelaporan realisasi anggaran. Target kinerja yang ditetapkan untuk tahun 2025 sebesar 90%, mengacu pada Rencana Kerja Tahun 2025 serta dokumen perencanaan Sekretariat Jenderal Dewan Nasional KEK. Sampai dengan akhir Triwulan I Tahun 2025, kualitas pelaksanaan anggaran telah mencapai 267,9% dari total target tersebut. Berikut hasil pengukuran kinerja dari indikator kualitas pelaksanaan anggaran Biro Pengendalian KEK:

Pencapaian Sasaran Program 4 : Terwujudnya Tata Kelola Biro Pengendalian KEK yang baik ditunjukkan oleh indikator kinerja yaitu Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Biro Pengendalian KEK. Capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1.1 Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Biro Pengendalian KEK

Latar Belakang

Pelaksanaan anggaran yang baik mencerminkan tidak hanya kemampuan biro dalam menyerap anggaran secara optimal, tetapi juga menunjukkan efektivitas biro dalam memadukan antara perencanaan program, pelaksanaan kegiatan, serta pertanggungjawaban keuangan secara tepat waktu dan tepat sasaran. Dalam pelaksanaannya, tata kelola anggaran tidak terlepas dari sistem manajemen internal yang terpadu dan profesional. Hal ini mencakup perencanaan anggaran yang berbasis kinerja, mekanisme pelaporan dan evaluasi yang terintegrasi, serta pengawasan internal yang berjalan secara efektif. Selain itu, keberhasilan pengelolaan anggaran juga sangat dipengaruhi oleh tersedianya sumber daya manusia yang kompeten dan profesional, dukungan sarana dan prasarana kerja yang memadai, serta sistem administrasi dan prosedur kerja yang efisien dan selaras dengan kebijakan kelembagaan.

Kualitas pelaksanaan anggaran tidak hanya diukur dari tingkat penyerapan semata, melainkan juga dari kesesuaian antara alokasi dan output yang dihasilkan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta kemampuan biro dalam menyesuaikan pelaksanaan kegiatan dengan dinamika dan kebutuhan di lapangan. Oleh karena itu, penguatan kapasitas kelembagaan, peningkatan kualitas SDM, serta pemanfaatan teknologi informasi dan sistem digitalisasi anggaran menjadi faktor-faktor penting yang harus terus dikembangkan dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola biro secara menyeluruh.

Indikator ini juga berperan sebagai cerminan kinerja biro dalam mendukung tata kelola Sekretariat Jenderal Dewan Nasional KEK secara umum, khususnya dalam menciptakan ekosistem kerja yang produktif, transparan, dan akuntabel. Peningkatan kualitas pelaksanaan anggaran akan berdampak langsung pada kelancaran implementasi program-program strategis pengendalian KEK, sehingga mendukung tercapainya tujuan nasional dalam pengembangan kawasan ekonomi yang berdaya saing dan inklusif.

Indikator kualitas pelaksanaan anggaran difokuskan pada penyusunan dan pelaporan realisasi anggaran. Sampai dengan akhir Triwulan I Tahun 2025, kualitas pelaksanaan anggaran telah mencapai 120%. Berikut hasil pengukuran kinerja dari indikator kualitas pelaksanaan anggaran Biro Pengendalian KEK:

Hasil Pengukuran Kinerja

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Tahun 2025	Realisasi s.d Triwulan I	Capaian Kinerja Triwulan I
Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Biro Pengendalian Kawasan Ekonomi Khusus	%	90 %	120%	120 %

Persentase tata kelola yang baik di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Nasional KEK merupakan indikator turunan langsung (cascading) dari indikator kinerja terkait tingkat realisasi anggaran. Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Biro Pengendalian telah mencapai 120%. Nilai capaian kualitas pelaksanaan anggaran diperoleh dari penghitungan dengan menggunakan formula berikut:

$$\% \text{ Kualitas Pelaksanaan Anggaran} = (\text{Capaian realisasi anggaran} \times 50\%) + (\text{Capaian Output} \times 50\%)$$

$$\text{Capaian Realisasi Anggaran} = \frac{\text{Realisasi Anggaran} / \text{Pagu Setelah Blokir}}{\text{Target per Triwulan}}$$

Capaian Output = Capaian Output sesuai Aplikasi SAKTI dan E-Monev

$$\begin{aligned} \% \text{ Kualitas Pelaksanaan Anggaran} &= (\text{Capaian realisasi anggaran} \times 50\%) + (\text{Capaian Output} \times 50\%) \\ &= (4,359 \times 50\%) + (1 \times 50\%) \\ &= 217,9\% + 50\% \\ &= 267,9\% \end{aligned}$$

$$\text{Capaian Realisasi Anggaran} = \frac{43.59\%}{10\%} = 4,359$$

$$\begin{aligned} \text{Capaian Output} &= \text{Capaian Output sesuai Aplikasi SAKTI dan E-Monev} \\ &= 100\% : 100\% = 1 \end{aligned}$$

Pelaksanaan Rencana Aksi, Capaian Program dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Rencana Aksi TW I	Status	Keterangan
1	Menyusun dan melaksanakan rencana kegiatan dan anggaran	Terlaksana	Biro Pengendalian telah melaksanakan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan serta dasar pengelolaan anggaran Tahun 2025, yang disusun sejalan dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Penyusunan ini dilakukan melalui rapat internal pembahasan program kerja dan anggaran yang diselenggarakan pada awal tahun anggaran 2025.
2	Mengidentifikasi capaian output	Terlaksana	Biro Pengendalian telah menyusun laporan realisasi anggaran sebagai wujud akuntabilitas terhadap penggunaan anggaran, sekaligus menjadi bagian dari monitoring dan evaluasi penyerapan anggaran sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Selain pelaksanaan rencana aksi utama, Biro Pengendalian KEK juga mengambil langkah-langkah pendukung untuk mendukung pencapaian target kinerja. Salah

2	Mengidentifikasi capaian output	Terlaksana	Biro Pengendalian telah menyusun laporan realisasi anggaran sebagai wujud akuntabilitas terhadap penggunaan anggaran, sekaligus menjadi bagian dari monitoring dan evaluasi penyerapan anggaran sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
---	---------------------------------	------------	---

Selain pelaksanaan rencana aksi utama, Biro Pengendalian KEK juga mengambil langkah-langkah pendukung untuk mendukung pencapaian target kinerja. Salah satunya adalah koordinasi internal terkait efisiensi dan penyesuaian alokasi anggaran agar tetap sejalan dengan kebutuhan dan kebijakan yang berlaku. Penyesuaian juga dilakukan terhadap perencanaan kegiatan dan realisasi anggaran sebagai respons atas kebijakan efisiensi, dengan tujuan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya dan menjaga pelaksanaan program tetap sesuai target.

Pada Triwulan I, anggaran yang telah terealisasi sekitar 43,59% dari total alokasi. Persentase realisasi tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar kegiatan telah mulai dilaksanakan pada awal tahun, sesuai dengan rencana kerja yang telah disusun.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan I Tahun 2025, pelaksanaan anggaran Biro Pengendalian KEK telah berjalan sesuai ketentuan, meskipun terdapat penyesuaian yang berdampak pada tingkat optimalisasi beberapa kegiatan. Upaya efisiensi dalam penggunaan anggaran mengakibatkan sebagian program mengalami keterbatasan ruang gerak, sehingga pelaksanaannya belum sepenuhnya mencapai target yang direncanakan.

Biro Pengendalian KEK berkomitmen untuk terus melakukan perbaikan guna mencapai kualitas kinerja yang diinginkan. Langkah-langkah yang diambil melibatkan penyelenggaraan rapat kerja, penyusunan database monitoring, serta penerapan monitoring dan pelaporan berkala. Dengan upaya ini, diharapkan kinerja pelaksanaan anggaran Biro Pengendalian KEK dapat mencapai target yang telah ditetapkan.

Jakarta, April 2025

Kepala Biro Pengendalian



Bambang Wijanarko